



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI

## MANAJEMEN PERUBAHAN

Tim Kerja



# **MANAJEMEN PERUBAHAN**

## **DAFTAR ISI**

- 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 196 Tahun 2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.**
- 2. Surat Undangan Rapat Input data Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja Tahun 2022 ke dalam aplikasi ERB dan Penyempurnaan LKE WBK Tahun 2023**
- 3. Surat Undangan Rapat Pembahasan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan**
- 4. Daftar Kehadiran Rapat Pembahasan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan**
- 5. Dokumentasi Rapat Pembahasan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan**

LINK Website LKE WBK WBBM Unit Puslitka

yaitu:

1. [https://internal.mkri.id/microsite/puslit/lke\\_wbk](https://internal.mkri.id/microsite/puslit/lke_wbk)
2. <https://puslit.mkri.id>



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196 TAHUN 2023 TAHUN 2023

### TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**

- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Pembangunana Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pembangunana Zona Integritas bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas di Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,  
HERU SETIAWAN**

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



Plt. Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

*Digital Signature*

*mk-225506295230512090528*

Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal MK  
Nomor : 196 TAHUN 2023  
Tanggal : 15 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT  
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT  
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

Pengarah	:	1.	Heru Setiawan
		2.	Muhidin
Penanggungjawab	:		Kurniasih Panti Rahayu
Ketua	:		Yuni Sandrawati
Sekretaris	:	1.	Nerpi Juita Sinurat
		2.	Siti Rosmalina Nurhayati
		3.	Selma Andana
		4.	Adam Ilyas
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	:	1.	Olfiziana Tri Hastuti
		2.	Dewi Fitriyani
		3.	Alboin Pasaribu
		4.	Rizkisyabana Yulistya Putri
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	:	1.	Anna Triningsih
		2.	Irfan Nur Rachman
		3.	M. Reza Winata
		4.	Lina Herlina
		5.	Luthfi Widagdo E.
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1.	Abdul Basid Fuadi
		2.	M. Lutfi Chakim
		3.	Titis Anindyajati
		4.	Mery Christian Putri
		5.	Erna Hasanah
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	:	1.	Pan M. Faiz Kusuma W.
		2.	Andriani N. Wahyuningtyas
		3.	Abdul Ghoffar
		4.	Zaka Firma Aditya
		5.	Elling Masitoh
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	:	1.	Oly Viana Agustine
		2.	Winda Wijayanti
		3.	Ananthia Ayu Devitasari
		4.	Erlina Maria C. Sinaga
		5.	Intan Permata Putri
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	1.	Hanindyo
		2.	Medi Kurniadi
		3.	Helmi Kasim
		4.	Rima Yuwana Y
		5.	Bisariyadi



Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal MK  
Nomor : 196 TAHUN 2023  
Tanggal : 15 Mei 2023

**URAIAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT  
KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT  
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;</li><li>2. Melakukan kerjasama dengan kementerian / lembaga / instansi terkait lainnya;</li><li>3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</li><li>4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</li><li>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas</li><li>6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</li><li>7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</li></ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;</li><li>2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas;</li><li>3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;</li><li>2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;</li><li>3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;</li><li>4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</li></ol>



4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;</li> <li>2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;</li> <li>3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;</li> <li>4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</li> </ol>
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;</li> <li>2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing;</li> <li>3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas;</li> <li>4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</li> </ol>





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 502/PP.00/03/2023

Jakarta, 30 Maret 2023

Hal : Undangan Rapat Input data Rencana Kerja  
Reformasi Birokrasi Unit Kerja Tahun  
2022 ke dalam aplikasi ERB

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pegawai

**(Daftar Nama Terlampir)**

di

Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi Nomor: 743/2220/RB.01/03/2023 Perihal Permohonan input data Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja Tahun 2022 ke dalam aplikasi ERB ( rb.mkri.id ) serta penyampaian Username dan Password, bersama ini dengan hormat kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada kegiatan Rapat Input data Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja Tahun 2022 ke dalam aplikasi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 April 2023  
Waktu : Pukul 08.00 – 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Kapuslitka Lt.8

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu pada rapat dimaksud, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara  
dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001

*Digital Signature*  
[mk1632611304230330115031](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**Lampiran Surat Undangan Rapat**

Nomor : 502/PP.00/03/2023

Tanggal : 30 Maret 2023

**Daftar Peserta Rapat:**

1. Kurniasih Panti Rahayu
2. Yuni Sandrawati
3. Nerpi Juita Sinurat
4. Rimas Kautsar
5. Anna Triningsih
6. Purwanto
7. Medi Kurniadi
8. Olfiziana Tri H
9. Elling Masitoh
10. Dewi Fitriyani
11. Titis Anindyajati
12. Winda Wijayanti
13. Intan Permata Putri
14. Rizkisyabana Y
15. M. Reza Winata
16. Siti Rosmalina
17. Adam Ilyas
18. Selma Andana





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 685/PP.00/05/2023

Jakarta, 09 Mei 2023

Hal : Undangan Rapat Pembahasan Zona Integritas Unit Kerja

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pegawai

(Daftar Nama Terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, bersama ini dengan hormat kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada kegiatan Rapat pembahasan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Mei 2023

Waktu : Pukul 13.00 WIB – Selesai

Tempat : Secara virtual menggunakan link aplikasi zoom

[https://zoom.us/j/96576916291?pwd=LzNLZXNpdHhOQ0ZmcXQwdV  
AxRytqUT09](https://zoom.us/j/96576916291?pwd=LzNLZXNpdHhOQ0ZmcXQwdV<br/>AxRytqUT09)

Meeting ID: 965 7691 6291

Passcode: 699760

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu pada rapat dimaksud, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara  
dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001

*Digital Signature*  
[mk1518254979230509110227](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**Lampiran Surat Undangan Rapat**

Nomor : 685/PP.00/05/2023

Tanggal : 09 Mei 2023

Daftar Peserta Rapat:

1. Kurniasih Panti Rahayu
2. Yuni Sandrawati
3. Nerpi Juita Sinurat
4. Medi Kurniadi
5. Anna Triningsih
6. Zaka Firma A
7. Rizkisyabana Yulistyaputri
8. Intan Permata Putri
9. Abdul Basid Fuadi
10. Titis Anindyajati
11. Winda Wijayanti
12. Muhammad Reza Winata
13. Dewi Fitriyani
14. Elling Masitoh
15. Adam Ilyas
16. Siti Rosmalina Nurhayati
17. Selma Andana



Judul :Rapat Pembahasan Zona Integritas Unit Kerja  
 Pembuat Rapat :Medi Kurniadi, S.Kom  
 Pengundang:Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
 Waktu Mulai :2023-05-09 13:00:00  
 Waktu Selesai :2023-05-09 15:00:00  
 Lokasi :kediaman masing-masing (zoom meeting)  
 Link SIKD :<https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=74.090523105544>  
 Link absen :<https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=269A239951D7A57F2B53257284C13963>  
**Perhatian** Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.  
 Link Notulensi Rapat :[https://sikd.mkri.id/FilesUploaded\\_sd\\_ttd/597-out-230509025609/597\\_230509030002\\_TTD\\_TTD.pdf](https://sikd.mkri.id/FilesUploaded_sd_ttd/597-out-230509025609/597_230509030002_TTD_TTD.pdf)  
 Link Zoom :<https://zoom.us/j/96576916291?pwd=LzNLZXNpdHhOQ0ZmcXQwdV AxRytqUT09>  
 Keterangan :Meeting ID: 965 7691 6291 Passcode: 699760

## Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	MKRI
2	Anna Triningsih	TIM Kesekretariatan MKMK 3 (Anna Triningsih)	MKRI
3	Yuni Sandrawati <b>Hadir : 12:50</b>	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara	MKRI
4	Nerpi Juita Sinurat <b>Hadir : 13:13</b>	Kepala Subbidang Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
5	Medi Kurniadi, S.Kom <b>Hadir : 13:09</b>	Pengadministrasi Umum-3 (Medi Kurniadi)	MKRI
6	Zaka Firma Aditya <b>Hadir : 13:37</b>	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Zaka Firma Aditya)	MKRI
7	Rizkisyabana Yulistyaputri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Rizkisyabana Yulistyaputri)	MKRI
8	Intan Permata Putri <b>Hadir : 13:23</b>	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Intan Permata Putri)	MKRI
9	Abdul Basid Fuadi <b>Hadir : 13:37</b>	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Abdul Basid Fuadi)	MKRI
10	Titis Anindyajati <b>Hadir : 14:23</b>	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Titis Anindyajati)	MKRI
11	Winda Wijayanti <b>Hadir : 13:47</b>	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Winda Wijayanti)	MKRI
12	Muhammad Reza Winata <b>Hadir : 13:22</b>	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda (Muhammad Reza Winata)	MKRI
13	Dewi Fitriyani <b>Hadir : 13:48</b>	Pustakawan Muda (Dewi Fitriyani)	MKRI
14	Elling Masitoh	Pustakawan Pelaksana (Elling Masitoh)	MKRI
15	Adam Ilyas <b>Hadir : 13:05</b>	Administrator Bidang Pengelola Jurnal Konstitusi (Adam Ilyas)	MKRI

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Institusi</b>
16	Selma Andana <b>Hadir : 13:11</b>	Administrator Bidang Pengelola Jurnal Constitutional Review (Selma Andana)	MKRI
17	Siti Rosmalina Nurhayati <b>Hadir : 13:18</b>	Tenaga Pengelola Jurnal Internasional Konstitusi (Siti Rosmalina Nurhayati)	M



